

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kapitalisme merupakan formasi sosial yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam perbincangan ekonomi di abad XXI. Bahkan, perkembangan kapitalisme sekarang sudah memasuki era noliberal. Negara yang menganut sistem neoliberal harus lebih mementingkan hak milik pribadi, aturan hukum, pranata-pranata pasar bebas serta perdagangan bebas. Negara justru ikut berperan dalam praktik-praktik ekonomi di ruang bebas ini. Lebih luas, kebebasan pasar itu didominasi oleh bisnis dan korporasi untuk beroperasi di wilayah pasar.<sup>1</sup>

Kunci dari kebaikan dalam perekonomian di era neoliberal ini adalah perusahaan swasta dan prakarsa interpreunial. Hak milik intelektual dilindungi dan semakin mendorong tumbuh suburnya temuan-temuan teknologi. Karena produktivitas terus meningkat maka gaya hidup seseorang juga cenderung mengikuti peningkatan itu. Untuk mengatasi keadilan ekonomi serta kemiskinan, neoliberal beranggapan bahwa hal itu bisa dicapai lewat skema pasar bebas dan perdagangan bebas.<sup>2</sup>

Kapitalisme atau kerap kali disebut sebagai ekonomi liberal tidak bisa dipisahkan dari sistem perekonomian negara. Dalam lanskap ekonomi politik, demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan telah muncul di seluruh dunia

---

<sup>1</sup> Harvey David, *A Brief History of Neoliberalism*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 65

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 65

mengalahkan ideologi-ideologi lainnya semisal fasisme, komunisme, atau monarki absolut.<sup>3</sup>

Kapitalisme atau lebih jauh berkenaan dengan pasar global mulai memasuki segala elemen. Bukan hanya bicara soal alat-alat produksi dan tenaga kerja. Namun kapitalisme juga mulai masuk serta mengontrol sumber daya alam (SDA) yang terbatas. Dalam pengontrolannya terhadap SDA, kapitalisme tidak memperhitungkan antara mengharmoniskan produksi dengan keseimbangan alam dan kebutuhan manusia. Yang dituju tiada lain bagaimana menghasilkan nilai tukar yang maksimal bagi setiap biaya yang dikeluarkan.<sup>4</sup>

Persoalan-persoalan ekonomi ini erat kaitannya dengan penguasaan SDA yang terbatas. SDA yang harusnya bisa diakses oleh semua rakyat Indonesia, kenyataannya hanya dikuasai oleh segelintir orang atau diprivatisasi korporasi-korporasi besar. Padahal hukum di Indonesia telah mengatur pemanfaatan SDA yang terbatas ini.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Sementara ayat 2 berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dari pasal 33 ayat 1 dan 2, Negara justru harus melindungi perekonomian rakyatnya dengan mendasarkan diri pada asas kekeluargaan. Di sisi lain, Negara juga memiliki

---

<sup>3</sup> Fukuyama Francis, *The End of History and The Last Man*, hlm. 1

<sup>4</sup> Gortz Andre, *Anarki Kapitalisme*, Terj. Komunitas Apiru, (Yogyakarta: Resist Book, 2011), hlm. 4-5

kewajiban agar alat-alat produksi yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh sama sekali diprivatisasi.

Alat-alat produksi yang terbatas dan bersifat umum sudah jauh-jauh hari diatur dan dituliskan dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanaannya, Negara dirasa gagal menjalankan hukum ini. Terbukti dengan hadirnya korporasi-korporasi yang dengan mudah mengambil dan memprivatisasi SDA di Indonesia. Semisal memprivatisasi sumber air dan menjadikannya sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Akhirnya, arus keuntungan dari pemanfaatan SDA di Indonesia tidak merata. Padahal seharusnya SDA yang terbatas itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Tidak jalannya pasal 33 UUD 1945 akibat politik Indonesia yang carut-marut dan masuknya kepentingan segelintir orang pada situasi politik itu. Terbukti dengan banyaknya korporasi yang mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menjalankan bisnis skala besar dengan menguasai SDA yang terbatas. Dalam pertambangan batubara misalnya, selama tahun 2015 terdapat 47 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, 1 perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dan 34 perusahaan pemegang Izin Usaha

Pertambangan. Ini hanya satu aspek saja (baca: batubara) dari sekian izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pada korporasi-korporasi terkait.<sup>5</sup>

Di sisi lain, tidak jalannya aturan ini bisa dilihat dari sering terjadinya konflik agraria di Indonesia. Geotimes mencatat, tahun 2012 ditemukan 198 kasus konflik agraria. Pada tahun 2013 meningkat 89% dan terdapat 369 kasus. Di samping meningkatnya kasus konflik agraria, pada tahun 2013 juga fenomena ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang sementara jumlah petani yang ditangkap ada 239 orang. Konflik agraria di Indonesia melibatkan 1,2 juta hektar tanah dan jumlah korban hampir mencapai 140 ribu kepala keluarga.<sup>6</sup>

Dari data di atas, bisa dilihat bahwa relasi atau pertukaran kepentingan yang terjadi pada situasi politik Indonesia. Penguasaan SDA bukan lagi ditujukan untuk kepentingan rakyat, tapi disediakan bagi siapa saja yang dapat membelinya dengan uang. Termasuk korporasi-korporasi yang menguasai SDA.

Jika situasinya demikian, tidak ada lagi perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 33 ayat 4. Gejolak politik Indonesia yang telah mengubah cita-cita perekonomian berkeadilan jadi ekonomi kepentingan, yang asalnya politik untuk rakyat jadi 'politik uang'.

---

<sup>5</sup> Diambil dari Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 2805 K/30/MEM/2015, Tentang: Penetapan Kebutuhan dan Presentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri Tahun 2015

<sup>6</sup> Videonya bisa dilihat di <http://youtube.com/watch?v=tM3ko3Y2ZY8>

SDA bukan lagi alat pencapaian ekonomi kerakyatan, melainkan alat mengerup keuntungan bagi segelintir orang. Rakyat menjadi tercerabut dan terpisah dari alat-alat produksinya. Ditambah, kerusakan alam akibat ekstraksi besar-besaran SDA oleh korporasi mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar. Dan pada akhirnya kerusakan lingkungan itu akan berdampak kembali pada rakyat.

Kerusakan lingkungan ini apabila dilihat dari aktifitas sosial-ekonomi terdapat empat hubungan timbal balik yang terjalin karena interaksi sistem sosial dan ekosistem. *Pertama*, asupan-asupan dari ekosistem ke dalam sistem sosial. Asupan ini bisa dalam bentuk energi (misal pangan, minyak bumi), material (antara lain protein, bahan-bahan bangunan), ataupun informasi (misalnya suara-suara atau stimulus visual). *Kedua*, asupan-asupan dari sistem sosial ke dalam ekosistem. Asupan itu bisa melalui arus materi, energi, atau informasi. *Ketiga*, perubahan dalam institusi-institusi penyusun sistem sosial dalam merespon asupan-asupan dari ekosistem. Perubahan ini dapat bersifat primer (menyebabkan dampak langsung) dan juga dapat bersifat sekunder. *Keempat*, perubahan-perubahan ekosistem dalam merespon asupan-asupan dari sistem sosial. Yaitu perubahan masyarakat dalam merespon perubahan ekosistem dan perubahan ekosistem dalam merespon perubahan sistem sosial. Perubahan ini bisa bersifat primer atau sekunder.<sup>7</sup>

Apabila beranjak dari teori interaksi sistem sosial dan ekosistem bisa dilihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di kelurahan Andir diakibatkan

---

<sup>7</sup> Iskandar Johan, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: Program Studi Magister Ilmu Pengetahuan, 2009), hlm.

kepentingan ekonomi yang ditandai dengan hadirnya korporasi batu. Dengan kata lain, asupan-asupan sistem sosial—dalam hal ini kepentingan ekonomi—dapat merubah kondisi ekosistem sekitar.

Di samping kerusakan lingkungan, privatisasi SDA dan kehadiran-kehadiran korporasi juga berdampak pada semakin parahnya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Tesis dari Muhtar Habibi menyebutkan bahwa surplus populasi relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Surplus populasi relatif yakni kombinasi antara pengangguran dan proletariat informal baik di pedesaan atau perkotaan. Sampai 2009, surplus populasi relatif menyumbang sekitar 74 orang (65,10 persen). Sedangkan pekerja aktif hanya mencapai 36 juta orang (32,29 persen). Salah satu yang sangat berdampak akibat kecilnya jumlah pekerja aktif karena masyarakat—dalam konteks ini petani—tidak mempunyai tanah untuk diolah. Dari tahun 1998, perluasan industri termasuk ekspansi perkebunan skala besar semakin berdampak pada banyaknya jumlah petani gurem dan tidak bertanah.<sup>8</sup> Berarti, dari tahun ke tahun jumlah privatisasi yang dilakukan oleh segelintir orang (baca: korporasi) semakin meningkat dan menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar SDA tersebut terpinggirkan dan harus rela menjadi seorang pekerja upahan di atas lingkungannya sendiri.

Berkaitan dengan privatisasi SDA serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kehadiran korporasi batu di kelurahan Andir. Peneliti akan menyebut satu contoh saja yakni korporasi batu yang ada di kampung Babakan Sandang, kelurahan Andir. Salah satu korporasi batu terbesar di kelurahan Andir

---

<sup>8</sup> Habibi Muhtar, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2016), hlm. 91-96

adalah PT Bumi Kalimantan Lestari (BKL). Penambangan itu mau tidak mau berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar baik secara positif atau negatif.

Kerusakan jalan karena alat-alat berat dari perusahaan membuat masyarakat mengeluh. Di tambah apabila musim hujan tiba, maka jalan akan digenangi air dan becek. Kondisi jalan seperti itu dianggap sangat merugikan bagi masyarakat yang setiap hari rumahnya dilewati kendaraan-kendaraan besar.

Sejak awal-awal penambangan batu beroperasi pada tahun 2008, sekitar 396 kepala keluarga (KK) di RW 12 Kampung Babakan Sandang melakukan protes. Mereka khawatir penambangan itu dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan serta keselamatan warga. Hal ini diakibatkan karena pemukiman warga berada tepat di bawah bukit yang dijadikan area penambangan.<sup>9</sup>

Pada 09 Oktober 2015 warga di Kampung Babakan Sadang, Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung memerotes penambangan batu yang dilakukan oleh PT BKL. Dari data yang ditemukan lebih dari 20 rumah warga sekitar retak-retak bahkan beberapa di antara mengalami rusak parah. Bagian rumah seperti dinding dan lantai amblas kurang lebih 10 centimeter.<sup>10</sup>

Kerusakan rumah warga diakibatkan karena lalu lalangnya kendaraan berat serta aktivitas penambangan. Sedangkan terkait *Corporate Social Responsibility*

---

<sup>9</sup> *Penambangan di Baleendah Diprotes Warga*, diakses di <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2008/07/25/74539/penambangan-di-baleendah-diprotes-warga> (Diakses Jum'at, 7 April 2017 jam 16.17 WIB)

<sup>10</sup> Nurdiansyah Rianto, Koran *Inilah Koran*, tanggal 09 Oktober 2015. Bisa diakses di <http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/48441/pemkab-bandung-akan-cek-penambangan-batu-di-baleendah> (Diakses Jum'at, 7 April 2017 jam 16.28 WIB)

(CSR) atau kompensasi yang dijanjikan oleh perusahaan tidak direalisasikan atau bahkan jauh dari kata ideal.<sup>11</sup>

Padahal apabila merujuk pada *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2013* tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dalam Bab XII perihal Ketentuan Pidana ayat tiga, disebutkan bahwa bagi perusahaan apapun yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Namun aturan ini tidak dijalankan, walaupun protes-protes dari warga terus disuarakan semenjak pertambangan batu yang diwakili oleh PT BKL ini hadir mengeksploitasi SDA yang ada di Kampung Babakan Sadang.

Seperti yang telah dilansir dalam *Jabar Ekspres*, tanggal 9 Oktober 2015 Dadang Naser selaku bupati Kabupaten Bandung, akan menindak lanjuti perusahaan yang melakukan penambangan itu.<sup>13</sup> Namun kenyataannya sampai sekarang, keluhan-keluhan warga belum terselesaikan sepenuhnya. Aktifitas penambangan masih terus berlangsung. Alat-alat berat dengan bebas lalu lalang di sekitar Kampung Babakan Andir, sehingga jalan bisa dibilang rusak parah.

Pada tahun 2015, PT BKL diduga belum mengantongi izin pendirian perusahaan tambang. Menurut Kanit Reskrim Polsek Baleendah Ipda Indra Adhiyana mengatakan, “Perizinan di Pemprov Jabar dan harus melalui tahapan-

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Diambil dari *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 8 tahun 2003, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*.

<sup>13</sup> Bisa dibaca dan diakses di <http://jabarekspres.com/2015/pemkab-desak-perusahaan-tanggung-jawab/> (Diakses Jum'at, 7 April 2017 jam 17.07 WIB)



tahapan. Salah satunya izin dari warga. Tapi kalau melihat warga justru mengeluhkannya, kami duga izin belum selesai”<sup>14</sup>

Berdasar pada permasalahan di atas, terdapat kesenjangan antara kondisi masyarakat di Kampung Babakan Sadang, korporasi batu, dan kebijakan pemerintahan daerah. Kesenjangan ini bisa dilihat dari tidak sejalan penerapan peraturan daerah, aktifitas pertambangan yang mengganggu warga, dan kehendak warga yang menginginkan pertambangan berhenti dan memberikan tanggung jawab sosialnya.

Bukan hanya persoalan privatisasi, struktur kelas juga jadi berbeda. Kelas yang dimaksud di sini adalah kelas yang didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi seperti yang telah Marx katakan.<sup>15</sup> Di tulisannya yang lain Marx menulis bahwa kelas erat kaitannya dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud mencakup para pemilik kapital dan pemilik tanah, yang sumber pendapatan masing-masingnya adalah upah-laba dan sewa tanah.<sup>16</sup>

Apabila dihubungkan dengan korporasi batu di Babakan Sadang, maka bisa dilihat perubahan kelas—dalam ranah kepemilikan alat produksi. Tentu hal ini berbeda sebelum alat-alat produksi semisal beku, truk, dan alat pemecah batu belum masuk kedalam kampung itu. Dengan masuknya alat produksi tersebut, maka bisa di sisi lain bisa juga dilihat perubahan gaya produksi warga setelah

---

<sup>14</sup> Lebih lengkap <http://fokusjabar.com/2015/10/08/pt-bumi-kalimantan-lestari-belum-kantongi-izin/> (Diakses Kamis, 25 Mei 2017 jam 09.47 WIB)

<sup>15</sup> Marx Karl & Frederick Engels, *The Communist Manifesto*, Terj. Frederick Engels, (New York: International Publishers, 2004), hlm. 6

<sup>16</sup> Marx Karl, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku III: Proses Produksi Kapitalis*, Terj. Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra, Ultimus, Institute for Global Justice, 2007), hlm. 956

SDA yang berupa gunung batu itu dikuasai dan dieksploitasi oleh PT BKL dan korporasi batu lainnya.

Contoh kecilnya, warga menjadi pekerja upahan yang mengoperasikan alat-alat produksi milik perusahaan. Dan mungkin saja persoalan produksi sebagai basis struktur ini memengaruhi superstruktur lainnya semisal interaksi, kebudayaan, atau malah menyumbang konflik di tataran masyarakat sendiri.

Sebagaimana yang dilansir oleh Fokus Jabar, diduga ada oknum masyarakat yang memainkan perjanjian, menyalahgunakan wewenang, atau memanipulasi data terkait kesepakatan antara warga dan perusahaan. Sehingga pertambangan terus berjalan walaupun sebagian kewajiban perusahaan tidak terealisasi.<sup>17</sup> Jika dilihat lagi, maka penting untuk mengajukan pertanyaan untuk siapa pertambangan batu itu didirikan di Babakan Sadang?

Dalam memahami kepentingan ekonomi dalam masyarakat serta struktur sosialnya, ada tiga ciri atau lapisan terkait yang harus dibicarakan: 1) pimpinan kelas elite yang kecil, terdiri dari pemilik tanah, borjuis kecil, birokrat, pedangang kaya; 2) kelas menengah yang terdiri dari pedagang kecil, pekerja-pekerja, tukang-tukang, pemilik toko; dan 3) lapisan terendah dan besar yang terdiri dari petani, buruh kasar, pekerja harian, golongan yang berpenghasilan rendah.<sup>18</sup>

Jika ciri ekonomi di atas dikaitkan dengan pola kebijakan pemerintahan sebagai instansi yang berhak melakukan pengambilan keputusan tertinggi, maka

---

<sup>17</sup> Di lansir dari <http://fokusjabar.com/2015/10/08/pt-bumi-kalimantan-lestari-belum-kantongi-izin/> (Diakses Kamis, 25 Mei 2017 jam 11.19 WIB)

<sup>18</sup> Sudarsono Juwano, *Politik dan Pembangunan: Pilihan Masalah*, Ce. II, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 23

yang terakomodir adalah struktur politik yang prinsipnya menjaga kepentingan sebagian kecil masyarakat. Meskipun kelompok ini sangat kecil tetapi kekayaan yang dijaganya amat besar.<sup>19</sup>

Kaitannya dalam memahami struktur kelas ini, sejauh mana PT BKL merepresentasikan kepentingan kelas dominan yang dihuni oleh orang-orang lapisan bawah? Jika memang tidak merepresentasikan kebutuhan warga sekitar, perlu dipertanyakan juga kenapa PT BKL terus saja melakukan pertambangan di sekitar perbukitan Kampung Babakan Sadang.

Untuk menemukan relasi kepentingan ini penting untuk dibuat garis demarkasi antara kebijakan pemerintahan daerah, kegiatan perusahaan, dan relasi kelas. Di sisi lain kehadiran PT BKL harus juga dilihat dalam lanskap pasar nasional dan situasi ekonomi-politik Indonesia di tingkat global.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Formasi sosial kapitalisme ditandai dengan kehadiran industri-industri. Kapitalisme merupakan titik tolak pembicaraan dewasa ini menyoal sistem ekonomi dan politik baik dalam skala nasional atau internasional. Hal itu bisa dilihat dari regulasi perdagangan, penanaman modal, privatisasi terhadap alat produksi dan SDA, serta beralihnya tenaga kerja menggunakan sistem upahan.

Ekonomi global mulai masuk dalam sektor-sektor industri yang ditandai dengan hubungan dan sarana-sarana produksi terkait. Apabila berbicara menyoal penelitian ini, maka bisa dilihat bahwa bentuk-bentuk kapitalisme diperlihatkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 24-25

dengan hadirnya PT Bumi Kalimantan Lestari (BKL) dan korporasi-korporasi batu di Kelurahan Andir khususnya di Kampung Babakan Sadang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Karena PT BKL merupakan perusahaan swasta, penanaman modal pun milik swasta dan/atau pribadi. Otomatis laba yang didapat juga ditujukan bukan sekedar untuk kepentingan sosial.

Di sisi lain, kehadiran PT BKL ini ternyata pernah diprotes oleh warga sekitar karena mengganggu aktivitasnya. Namun, protes tersebut sampai sekarang masih belum terealisasi, sarana pra sarana sosial semisal jalan yang rusak karena lalu lalangnya alat-alat berat milik perusahaan sampai sekarang belum diperbaiki. Oleh karena itu penting untuk menyoroti praktik-praktik formasi sosial kapitalisme yang mewujud dalam korporasi-korporasi batu dan PT BKL sebagai perusahaan batu terbesar di Kelurahan Andir.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dari daya-daya produktif material dan hubungan produksi yang terlihat pada korporasi-korporasi batu di Kelurahan Andir?
2. Bagaimana dampak kehadiran industri pertambangan batu di Kelurahan Andir pada masyarakat sekitar?
3. Kenapa korporasi-korporasi batu di Kelurahan Andir masih melakukan aktivitas pertambangan di tengah ketidaksepakatan warga sekitar?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Melihat dari perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik-praktif formasi sosial kapitalisme bekerja dalam PT BKL. Adapun uraian dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dari daya-daya produktif material dan hubungan produksi yang terlihat pada korporasi-korporasi batu di Kelurahan Andir.
2. Untuk mengetahui dampak kehadiran industri pertambangan batu di Kelurahan Andir pada masyarakat sekitar.
3. Untuk mengetahui alasan aktivitas pertambangan masih dilakukan oleh korporasi-korporasi batu di tengah ketidaksepakatan warga sekitar.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas serta menjadi fokus kejadian dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis terhadap perkembangan keilmuan sosiologi berkenaan dengan praktik dan/atau bentuk-bentuk kapitalisme—yang ditunjukkan dengan sarana-sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi—di pedesaan khususnya dalam lanskap korporasi batu. Di sisi lain, untuk mengetahui sejauh mana korporasi batu memainkan pasar nasional. Dan yang

terakhir menemukan kesenjangan dari apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya ketika suatu warga menginginkan pertambangan batu dihentikan namun justru aktivitas pertambangan terus berjalan.

2. Manfaat praktis, memberi masukan kepada pihak desa setempat dalam menyikapi kehadiran korporasi batu di tengah ketidaksepakatan warga. Memberikan pengetahuan pada warga sekitar apakah kehadiran korporasi batu di Babakan Sadang itu menguntungkan bagi kesejahteraan sosial warga atau tidak.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Apabila hendak menyoroti aspek ekonomi dari suatu negara maka tidak bisa dilepaskan dari persoalan formasi sosial. Formasi sosial selalu ada dalam suatu komunitas baik bermula dari yang primitif hingga berbentuk negara. Dalam mendefinisikannya, Samir Amin membatasi formasi sosial sebagai suatu tatanan sosial ekonomi yang terorganisasi dimana corak-corak produksi ter subordinat pada corak produksi dominan.<sup>20</sup> Sedangkan yang dimaksud corak produksi adalah suatu kegiatan ekonomi yang mencakup daya-daya produksi, alat-alat (perkakas) produksi, teknik, dan ralisasi-relasi atau hubungan-hubungan produksi.<sup>21</sup> Formasi sosial juga bisa disebut sebagai corak produksi dominan yang merujuk pada suatu

---

<sup>20</sup> Amin Samir, *Unequal Development: An Essay on the Social Formation of Peripheral Capitalism*, (New York: Monthly Review Press, 1976), hlm. 16

<sup>21</sup> Weber Max, *The Protestant Ethics and Spirit of Capitalis*, Terj. Talcott Parsons, (New York: Charles Scribner's Sons, 1958), hlm. 25

tatanan hubungan antar orang dalam kehidupan ekonomi, politik, maupun budaya.<sup>22</sup>

Titik inti yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menggali sejauh mana praktik-praktik kapitalisme bekerja di pedesaan yang termanifestasikan dengan kehadiran industri pertambangan. Untuk mengungkap formasi sosial kapitalisme ini, peneliti menggunakan Karl Marx sebagai basis teori. Sedangkan untuk penunjang atau penguat teorinya, peneliti menggunakan juga ilmuwan-ilmuan marxis baik dari yang klasik semisal Lenin dan Kautsky hingga pada yang kontemporer seperti Maurice Godelier.

Untuk membedah seluk beluk kapitalisme di pedesaan, peneliti membaginya dalam kategorisasi. Kategori kapitalisme yang peneliti pakai—dan juga dituliskan di Bab 2—terbagi menjadi beberapa poin. *Pertama*, peneliti mencoba mengungkap berkaitan dengan kerja, komoditas, dan nilai. Secara sederhana kerja bisa disebut sebagai kemampuan manusia dalam mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Atau bisa juga disebut kegiatan produksi dengan mengerahkan sumber daya dan menggunakan sarana tertentu.<sup>23</sup> Karena kerja itu merupakan pola aktivitas manusia dalam produksi, maka tentunya akan menghasilkan nilai. Nilai yang terhasikan dari kerja adalah nilai guna dan nilai tukar. Nilai tukar inilah yang membuat hasil produksi akhir menjadi sebuah komoditas.

*Kedua*, karena produksi telah diarahkan untuk komoditas, maka secara otomatis terdapat akumulasi kapital. Secara sederhana akumulasi kapital biasa

---

<sup>22</sup> Mulyanto Dede, *Geneologi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*, (Yogyakarta: Resist Book, 2012), hlm. xiv

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. xvii

dikenal sebagai laba. Dalam upaya sistematis memperoleh laba, inti persoalannya adalah nilai dari suatu komoditas, tersedianya pasar, dan efisiensi dalam pengorganisasian perusahaan. Otomatis karena semua aspek itu harus bersinergis maka menyaratkan manajemen rasional kekuatan tenaga kerja sedemikian rupa hingga meminimalisir serendah-rendahnya biaya produksi.<sup>24</sup>

*Ketiga*, karena terdapat kerja dalam hasil produksi, maka pasti ditopang oleh sarana-sarana produksi serta kekuatan atau daya-daya produksi di dalamnya. Sarana-sarana produksi bisa dibilang sebagai alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan daya produksi adalah tenaga kerja yang menjalankan atau memfungsikan sarana produksi tersebut. Oleh karena itu, kedua elemen ini tidak bisa dilepaskan dalam praktik-praktik kapitalisme.

*Keempat*, peneliti mencoba mengungkap relasi kelas antara para pekerja dengan industri yang hadir di kelurahan Andir. Tentu pembicaraan kelas dalam tradisi marxis—terutama marxis klasik—merupakan suatu yang tidak bisa terlewatkan. Karena ketimpangan ekonomi erat kaitannya dengan kelas ini. Dalam memahami kelas, peneliti menyandarkannya pada kepemilikan alat produksi sebagaimana yang dikatakan oleh Marx. Dan tentunya relasi kelas ini yang akan lebih jauh peneliti elaborasi dalam bentuk hubungan-hubungan produksi.

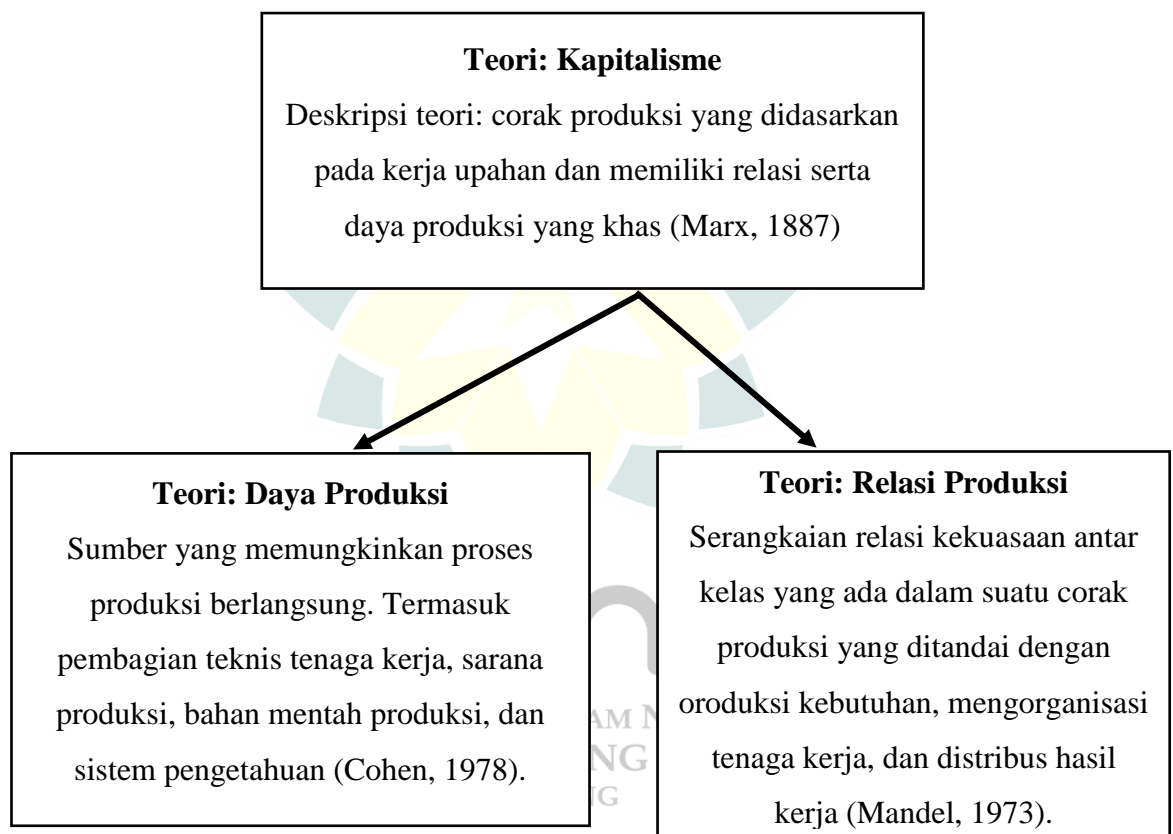
Penelitian peneliti juga berkaitan dengan pola kebijakan negara yang bisa dilihat dari aturan-aturan daerah. Di sini peneliti akan mengungkap relasi kepentingan ekonomi dan/atau desakan neoliberalisme dari luar ke Indonesia

---

<sup>24</sup> Jones Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 33-34



sebagai akibat dari merajalelanya praktik-praktik pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti akan mencoba mengelaborasi kajian ini secara skala makro: bagaimana kehadiran industri-industri pertambangan batu di kelurahan Andir itu sebagai regulasi kebijakan yang mendukung pada pasar global. Untuk memerkuatnya, peneliti menggunakan para sosiolog kontemporer yang sering menulis perihal neoliberalisme semisal Harry Shutt dan David Harvey.



**Gambar 1**  
**Skema Konseptual**